

BAB II

KAJIAN TEORI

2.1 Penelitian Terdahulu

Kajian **pertama** menurut Wardiono et al. (2020), dalam kajian ini menggunakan metode analisis kualitatif dengan pendekatan historis. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang menyebabkan kekalahan partai-partai Islam dalam pemilu legislatif di Indonesia. Penulis ingin menunjukkan bahwa kekalahan ini bukan hanya hasil dari kondisi politik saat ini, tetapi juga dipengaruhi oleh keputusan-keputusan politik yang diambil pada masa lalu.

Penelitian ini menghasilkan dua temuan utama. Pertama, kekalahan partai Islam Indonesia sepanjang lintasan politik dari pemilu 1955 hingga 2019 merupakan hasil dari mekanisme kausal yang terkait dengan keputusan politik agen dalam momen *critical junctures*. Keputusan-keputusan tersebut memiliki efek signifikan terhadap jalur perkembangan partai Islam dan mengarah pada hasil kekalahan dalam pemilu legislatif. Kedua, kekalahan partai Islam Indonesia menunjukkan adanya pola *path dependence repetition*, yang mencakup tiga proses *path dependence* yang dipicu oleh tiga momen *critical junctures* berupa keputusan politik agen partai. Masing-masing proses ini menghasilkan rangkaian peristiwa lanjutan kausal dalam tahapan *aftermath of critical juncture*, seperti proses *reactive sequences* dan *reinforcement*, serta *self-reinforcing sequences*. Temuan ini menegaskan bahwa kekalahan partai-partai Islam tidak dapat dipisahkan dari konteks sejarah dan keputusan-keputusan politik yang telah dibuat sebelumnya.

Perbedaan kajian Agus Riyanto dengan kajian peneliti terletak pada titik *focus* kajian. Pada kajian jurnal Agus Riyanto lebih menekankan pada analisis kekalahan dan faktor-faktor historis yang menyertainya, kajian peneliti akan lebih menyoroti aspek pemberdayaan perempuan dan bagaimana PKB mencoba menanggapi tantangan gender dalam politik. Peneliti akan menganalisis strategi yang digunakan oleh anggota legislatif perempuan PKB untuk mengatasi stigma dan tantangan yang ada, serta bagaimana mereka membangun dukungan di kalangan pemilih. Ini mencakup pendekatan komunikasi, kampanye sosial, dan advokasi isu-isu gender yang relevan

Kajian yang **kedua** Ibnu Khoer et al. (2021). Dalam kajian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif. Penelitian ini mendeskripsikan pandangan Quraish Shihab mengenai kepemimpinan perempuan berdasarkan analisis terhadap teks-teks dan pemikiran beliau. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi dan menganalisis pandangan M. Quraish Shihab tentang kepemimpinan perempuan dalam perspektif hukum Islam.

Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa M. Quraish Shihab memiliki pandangan yang lebih moderat mengenai kepemimpinan perempuan dibandingkan dengan ulama klasik. Ia berpendapat bahwa perempuan diperbolehkan untuk memimpin di ruang publik selama mereka tetap memenuhi tanggung jawab utama mereka di rumah. Penelitian ini menegaskan bahwa perbedaan pendapat di kalangan ulama disebabkan oleh konteks sosial dan budaya yang berbeda, serta perlunya interpretasi hukum Islam yang adaptif terhadap kondisi zaman saat ini. Meskipun kedua kajian ini membahas tema terkait kepemimpinan perempuan dalam konteks Islam, namun memiliki fokus, metodologi, dan tujuan yang berbeda. Jurnal tersebut memberikan perspektif teoritis mengenai legitimasi kepemimpinan perempuan menurut hukum Islam, sementara peneliti berupaya mengeksplorasi dinamika praktis dan strategis yang dihadapi oleh kader perempuan PKB dalam konteks pemilihan umum legislatif di tingkat lokal.

Kajian **ketiga** Finlay & Hopkins. (2019), kajian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif yang melakukan wawancara mendalam dan diskusi kelompok fokus dengan 19 perempuan Muslim muda di Skotlandia. Dari jumlah tersebut, 16 peserta berusia antara 15 hingga 27 tahun, sedangkan tiga peserta lainnya berusia di atas 28 tahun dan memiliki peran publik yang signifikan.

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana pengalaman diskriminasi gender dan Islamofobia mempengaruhi partisipasi politik perempuan Muslim muda di Skotlandia. Peneliti ingin menunjukkan bahwa meskipun perempuan Muslim muda menghadapi berbagai tantangan akibat stereotip negatif dan diskriminasi, mereka tetap memiliki kepercayaan diri politik dan terlibat dalam kehidupan politik serta sosial melalui berbagai mekanisme. Penelitian ini juga bertujuan untuk menyoroti pentingnya konteks sosial dan budaya Skotlandia dalam membentuk identitas politik dan partisipasi perempuan Muslim.

Perbedaan kajian yang ditemui terdapat pada analisis pengalaman diskriminasi yang dihadapi oleh perempuan Muslim muda di Skotlandia dan bagaimana hal itu mempengaruhi partisipasi politik mereka. Sementara itu, penelitian saya lebih menyoroti strategi politik anggota legislatif perempuan dari PKB dalam konteks pemilihan umum legislatif di Kota Malang. Fokus saya adalah untuk memahami bagaimana PKB mencalonkan kader perempuan meskipun ada pandangan dalam beberapa interpretasi ajaran Islam yang menyatakan bahwa perempuan tidak seharusnya menjadi pemimpin. Ini menciptakan pertanyaan menarik tentang konsistensi antara ajaran agama dan praktik politik.

Kajian **keempat** Akinwale et al. (2024), kajian jurnal ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan wawancara semi-terstruktur. Penelitian ini melibatkan 42 peserta yang dipilih melalui teknik purposive dan snowball sampling, yang dianggap sesuai untuk memahami disparitas gender dalam masyarakat yang didominasi oleh pria.

Temuan penelitian menunjukkan adanya dominasi pria yang terinstitusikan dalam politik dan kepemimpinan agama, di mana perempuan merasa kurang terwakili. Meskipun demikian, perempuan menunjukkan optimisme terhadap perubahan dan menyuarakan kebutuhan akan kampanye publik yang lebih kuat untuk meningkatkan representasi mereka. Penelitian ini menekankan bahwa perempuan aktif dalam memperjuangkan hak-hak mereka dan menentang diskriminasi gender, serta menunjukkan bahwa ada harapan untuk perbaikan dalam hal kesetaraan gender di masa depan. Meskipun kajian jurnal dengan kajian peneliti berfokus pada isu ketidaksetaraan gender, kajian peneliti lebih terarah pada dinamika politik dan strategi dalam konteks pemilihan umum, sementara jurnal tersebut lebih menekankan pada persepsi sosial dan harapan perubahan dari perempuan dalam masyarakat secara umum.

Kajian **kelima** Fleschenberg & Bari. (2015), kajian ini Andrea Fleschenberg dan Farzana menggunakan metode kualitatif untuk mengumpulkan data. Penelitian ini melibatkan wawancara semi-terstruktur dengan 72 partisipan, termasuk parlemen, birokrat, aktivis masyarakat sipil, dan lain-lain. Selain itu, juga dilakukan diskusi kelompok dengan aktivis masyarakat sipil. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengkaji efektivitas kuota gender dalam mengurangi patriarki politik

dan meningkatkan perwakilan perempuan dalam parlemen. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi konstant-konstant yang dihadapi oleh perempuan dalam sistem politik, serta bagaimana kuota gender dapat mempengaruhi perubahan dalam Masyarakat.

Perbedaan kajian tersebut dengan kajian peneliti adalah jurnal tersebut menyoroti efektivitas kuota gender secara umum dan tantangan yang dihadapi perempuan di dua negara tersebut, sedangkan kajian saya lebih spesifik pada dinamika politik dan strategi yang digunakan oleh anggota legislatif perempuan PKB dalam konteks pemilihan umum. Selain itu, sementara jurnal tersebut menunjukkan bahwa meskipun kuota gender dapat meningkatkan perwakilan, masih ada stigma dan tantangan yang signifikan, kajian saya akan mengeksplorasi bagaimana PKB menavigasi tantangan tersebut dengan mencalonkan kader perempuannya, meskipun ada pandangan tradisional dalam ajaran Islam yang membatasi peran perempuan sebagai pemimpin. Dengan demikian, kedua kajian ini saling melengkapi dalam memahami kompleksitas peran perempuan dalam politik di berbagai konteks.

Kajian **keenam** Ballington & Karam, (2005), tujuan dari kajian ini adalah untuk mengeksplorasi berbagai hambatan yang dihadapi perempuan dalam mencapai posisi legislatif, serta untuk memberikan rekomendasi tentang cara mengatasi hambatan tersebut. Buku ini menekankan bahwa meskipun ada peningkatan jumlah perempuan di parlemen, tantangan struktural seperti patriarki, kurangnya dukungan partai politik, dan stereotip gender masih menjadi penghalang signifikan.

Temuan dari buku ini menunjukkan bahwa meskipun kuota gender dapat meningkatkan jumlah perempuan di parlemen, hal itu tidak selalu berujung pada kekuatan politik yang nyata bagi mereka. Banyak perempuan yang terpilih masih menghadapi stigma dan tantangan dalam menjalankan peran mereka. Kajian ini saling melengkapi memberikan gambaran umum tentang tantangan global yang dihadapi perempuan dalam politik, sedangkan kajian peneliti menawarkan analisis mendalam tentang strategi dan konteks lokal yang spesifik terkait dengan partisipasi politik perempuan di Indonesia.

Kajian **ketujuh** Perempuan et al. (2019), tujuan dari kajian ini adalah untuk mengeksplorasi kebijakan dan praktik yang mempengaruhi representasi perempuan dalam partai politik di Indonesia. Jurnal ini bertujuan untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung atau menghambat keterlibatan perempuan dalam politik dan bagaimana hal tersebut berdampak pada kebijakan publik.

Temuan utama dari penelitian ini menunjukkan bahwa meskipun ada peningkatan jumlah perempuan di DPRD, representasi mereka masih terhambat oleh berbagai faktor struktural dan budaya dalam partai politik. Banyak partai masih menerapkan praktik diskriminatif yang membatasi akses perempuan ke posisi kepemimpinan dan pengambilan keputusan. Selain itu, anggota parlemen perempuan menghadapi tantangan dari sistem politik yang didominasi oleh laki-laki serta kurangnya dukungan dari jaringan sosial dan ekonomi. Perbedaan utama antara kajian penulis dengan jurnal tersebut terletak pada fokus spesifiknya, kajian penulis lebih terarah pada strategi pencalonan kader perempuan PKB dalam konteks pemilihan umum di Kota Malang, sementara jurnal tersebut membahas representasi perempuan secara umum dalam partai-partai politik di Indonesia. Penulis juga mengeksplorasi pengaruh teori Islam yang menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin dan bagaimana hal ini bertentangan dengan keputusan PKB untuk mencalonkan kader perempuannya.

Kajian **kedelapan** Jalajel & Mohamed. (2013), kajian ini mengkaji literatur hukum Islam pasca-formasi untuk mengeksplorasi pertanyaan mengenai kepemimpinan perempuan dalam konteks hukum Islam. David Solomon menerjemahkan dan menganalisis bagian-bagian yang relevan dari teks-teks Islam dengan menggunakan tiga pendekatan analisis, yaitu analisis hukum-hermeneutik, analisis motif gender, dan analisis diachronik atas argumen hukum. Metode ini bertujuan untuk memahami bagaimana para ulama klasik sampai pada kesimpulan yang melarang kepemimpinan perempuan dalam politik, peradilan, dan shalat berjamaah.

Temuan utama dari jurnal ini menunjukkan bahwa larangan kepemimpinan perempuan dalam konteks hukum Islam tidak hanya dipengaruhi oleh interpretasi teks-teks suci (Al-Qur'an dan Sunnah), tetapi juga oleh sikap gender yang ada dalam masyarakat selama periode pembentukan hukum Islam. David Solomon

menemukan bahwa banyak argumen yang digunakan oleh para ulama untuk mendukung larangan ini bersifat patriarkal dan mencerminkan norma-norma sosial yang berlaku pada saat itu. Selain itu, penulis menekankan bahwa meskipun ada pengaruh budaya dan sosial, penting untuk tidak mengabaikan peran sumber-sumber skriptural dalam membentuk pandangan mengenai kepemimpinan perempuan dalam Islam.

Perbedaan jurnal tersebut dengan kajian penulis terletak pada eksplorasi bagaimana PKB dapat beroperasi dalam kerangka teori Islam yang menentang kepemimpinan perempuan, serta tantangan dan peluang yang mereka hadapi dalam mendukung keterlibatan perempuan di ranah politik. Dengan demikian, kajian penulis berusaha menjawab pertanyaan tentang bagaimana partai berbasis Islam seperti PKB dapat mengatasi tantangan internal dan eksternal serta implikasinya terhadap dinamika kekuasaan gender di Indonesia, sementara jurnal tersebut lebih menganalisis dasar-dasar hukum dan sosial dari larangan terhadap kepemimpinan perempuan dalam konteks sejarah dan budaya Islam.

Kajian **kesembilan** Muhibbu-Din, (2019), yang mengkaji posisi perempuan dalam politik Islam modern dan tantangan yang dihadapi dalam mencapai kesetaraan gender. Penelitian ini menggunakan metode analisis komparatif dan konten, di mana Mahmudat membandingkan partisipasi politik perempuan di negara-negara yang menyatakan Islam sebagai agama resmi dengan menganalisis teks-teks Islam untuk mengeksplorasi posisi perempuan dalam pemerintahan dan partisipasi politik, serta faktor-faktor yang mempengaruhi keterlibatan perempuan dalam politik.

Kajian ini bertujuan untuk mengeksplorasi faktor-faktor yang bertanggung jawab atas eksklusi perempuan dari politik modern, serta untuk menyelidiki posisi tekstual Islam mengenai peran perempuan dalam Masyarakat. Temuan utama dari jurnal ini menunjukkan bahwa ketidaksetaraan gender dalam partisipasi politik adalah fenomena global. Meskipun banyak negara yang menyatakan Islam sebagai agama resmi, beberapa di antaranya telah melakukan *mainstreaming* gender yang lebih baik dibandingkan dengan beberapa demokrasi maju. Hambatan terhadap partisipasi politik perempuan bervariasi, mulai dari faktor sosial-ekonomi hingga institusional.

Pebedaan dengan kajian penulis yaitu dengan mempertimbangkan konteks lokal dan spesifik dari PKB sebagai partai berbasis Islam di Indonesia, termasuk bagaimana mereka menanggapi norma-norma tradisional yang membatasi peran perempuan. Jurnal tersebut tidak hanya membahas teori-teori hukum Islam tetapi juga menjelaskan bagaimana praktik-praktik sosial dan budaya mempengaruhi implementasi teori tersebut dalam kehidupan nyata. Dengan demikian, kajian penulis berusaha menjawab pertanyaan tentang bagaimana PKB dapat menjadi contoh bagi partai-partai lain dalam mendukung keterlibatan perempuan meskipun ada norma-norma tradisional yang membatasi, sedangkan jurnal tersebut lebih fokus pada analisis umum tentang posisi dan tantangan perempuan dalam politik Islam secara keseluruhan.

Kajian **kesepuluh** Elius. (2010) membahas posisi perempuan dalam kepemimpinan di negara-negara Islam, dengan fokus pada argumen yang mendukung dan menentang kepemimpinan perempuan berdasarkan teks-teks Islam. Kajian ini menggunakan pendekatan analisis kritis terhadap teks-teks hukum Islam dan tradisi Nabi Muhammad. Penulis menganalisis argumen dari kedua sisi baik yang mendukung maupun yang menentang kepemimpinan perempuan dengan merujuk pada ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis. Penelitian ini juga mencakup tinjauan sejarah mengenai peran perempuan di masyarakat Islam awal, serta bagaimana interpretasi terhadap teks-teks tersebut telah berkembang seiring waktu.

Temuan utama dari jurnal ini menunjukkan bahwa terdapat argumen kuat baik untuk mendukung maupun menolak kepemimpinan perempuan dalam Islam. Di satu sisi, ada ayat-ayat Al-Qur'an yang menunjukkan kesetaraan antara laki-laki dan perempuan dalam hal hak dan tanggung jawab. Namun, di sisi lain, terdapat juga interpretasi yang menyatakan bahwa laki-laki memiliki keunggulan tertentu atas perempuan, sehingga mereka tidak layak menjadi pemimpin. Kajian ini memiliki perbedaan yang mendasar dengan kajian penulis yang mengeksplorasi bagaimana PKB, dalam menghadapi tantangan dari teori-teori Islam. Dalam hal ini, kajian penulis berusaha untuk memahami bagaimana PKB dapat mencalonkan kader perempuannya meskipun ada norma-norma tradisional yang membatasi peran perempuan dalam politik. Sementara itu, jurnal diatas lebih menekankan pada analisis tekstual dan sejarah mengenai posisi perempuan dalam kepemimpinan.

Kajian **kesebelas** Umari & Indra Dewi. (2020) menganalisis strategi komunikasi yang diterapkan oleh calon legislatif perempuan di Kota Malang selama pemilihan umum legislatif tahun 2019. Tujuan utama dari kajian ini adalah untuk mengetahui bagaimana strategi komunikasi politik yang diterapkan oleh caleg perempuan dan hambatan apa yang mereka hadapi dalam proses kampanye.

Hasil dari kajian ini menunjukkan bahwa strategi komunikasi politik yang efektif bagi caleg perempuan meliputi pendekatan door-to-door, menjalin hubungan dengan tokoh agama dan struktural, serta membentuk tim sukses yang solid. Dalam kajian penulis terdapat beberapa perbedaan spesifik dibandingkan dengan jurnal tersebut. Fokus kajian penulis lebih terarah pada strategi kampanye politisi perempuan PKB dalam konteks pemilihan umum di Kota Malang, sementara jurnal tersebut membahas strategi komunikasi politik secara umum dari beberapa caleg perempuan dari berbagai partai.

Kajian **keduabelas** Bilgiler et al. (2019) membahas posisi perempuan dalam kepemimpinan dan kesetaraan gender dalam konteks ajaran Islam. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengadvokasi posisi perempuan sebagai pemimpin dalam Islam dan merekonstruksi pemahaman tentang kepemimpinan perempuan berdasarkan perspektif Al-Qur'an, hadis, fiqh, tasawwuf, siyasah, dan sejarah.

Temuan utama dari jurnal ini menunjukkan bahwa secara prinsipil, tidak ada larangan tegas dalam Islam yang menolak kepemimpinan perempuan di berbagai bidang. Temuan ini menegaskan bahwa interpretasi tradisional yang menempatkan perempuan pada posisi inferior sering kali didasarkan pada nilai-nilai patriarkal yang tidak sesuai dengan semangat keadilan dan kesetaraan gender yang diajarkan oleh Islam. Temuan ini juga menyebutkan contoh-contoh perempuan berpengaruh dalam sejarah Islam, seperti Khadijah dan Aisha, serta menekankan pentingnya memahami konteks sosial dan budaya saat menganalisis posisi perempuan dalam kepemimpinan. Jika dibandingkan dengan kajian penulis, terdapat perbedaan spesifik dibandingkan dengan jurnal tersebut yang terletak pada fokus kajian kajian penulis lebih terarah pada strategi politisi perempuan PKB dalam menghadapi tantangan pandangan Masyarakat muslim di Kota Malang pada masa kampanye, sedangkan jurnal ini membahas posisi perempuan dalam kepemimpinan secara umum dalam konteks ajaran Islam.

Kajian Koburtay et al. (2023), mengeksplorasi pengalaman pemimpin perempuan dalam konteks interaksi antara gender, agama, dan budaya di Yordania. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode induktif. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam dengan pemimpin perempuan di Yordania untuk memahami persepsi mereka mengenai peran agama dan norma budaya dalam kenaikan mereka ke posisi kepemimpinan. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengeksplorasi bagaimana pemimpin perempuan di Yordania menginterpretasikan dan menanggapi stereotip serta diskriminasi yang ada di masyarakat mereka.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemimpin perempuan di Yordania mengadopsi pandangan feminis Islam dan tidak sepenuhnya menerima pandangan feminis liberal atau sosialis/Marxis. Mereka ingin merebut kembali agama mereka dari interpretasi monolitik yang sering kali mengekang aspirasi mereka. Para pemimpin perempuan ini berusaha untuk mendapatkan ruang kepercayaan dan tanggung jawab dalam posisi kepemimpinan yang tidak mereka anggap bertentangan dengan pemahaman iman mereka. Penelitian ini juga mengungkapkan bahwa stereotip prejudisial dan diskriminasi di masyarakat sangat terkait dengan tradisi sosial budaya patriarkal yang menekankan kontrol laki-laki.

Secara keseluruhan, meskipun kajian tersebut dengan kajian peneliti membahas tema kepemimpinan perempuan dalam konteks Islam, pendekatan dan fokusnya sangat berbeda. Koburtay lebih menekankan pengalaman individu pemimpin perempuan dan interaksi mereka dengan norma-norma budaya serta agama di Yordania, sedangkan kajian peneliti berfokus pada strategi politik dan respons partai berbasis Islam terhadap tantangan gender di Indonesia. Dengan demikian, kedua penelitian ini saling melengkapi dalam memahami dinamika kepemimpinan perempuan dalam konteks sosial dan politik yang berbeda.

Kajian **keempatbelas** Widianti et al. (2023), penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan fokus pada DPC PDIP dan DPC Partai Demokrat di Kota Surabaya. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan strategi yang diterapkan oleh kedua partai politik dalam upaya meningkatkan keterwakilan perempuan di legislatif. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mendeskripsikan strategi partai politik dalam meningkatkan efikasi politik calon

anggota legislatif perempuan guna mewujudkan kesetaraan gender dalam politik pada Pemilihan Umum Kota Surabaya tahun 2019.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa kedua partai, PDIP dan Partai Demokrat, menerapkan strategi ofensif dalam mendukung kader perempuan mereka. Strategi tersebut mencakup pemberian akses dan fasilitas untuk memfasilitasi calon anggota legislatif perempuan, serta kampanye yang dirancang untuk menarik perhatian pemilih terhadap keberadaan dan kemampuan perempuan sebagai calon legislatif. Penelitian ini menemukan bahwa strategi Partai Demokrat lebih efektif dibandingkan dengan PDIP dalam meningkatkan efikasi politik kader perempuan, sehingga menghasilkan jumlah kursi yang lebih banyak bagi anggota DPRD perempuan terpilih.

Perbandingan kajian tersebut dengan kajian peneliti terletak pada eksplorasi bagaimana PKB, sebagai partai berbasis Islam, menghadapi tantangan dari teori-teori Islam yang menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Sementara jurnal ini lebih menekankan pada aspek strategis dan efektivitas dari dukungan yang diberikan oleh partai-partai politik kepada kader perempuan mereka tanpa mengaitkannya langsung dengan perspektif religius. Kajian peneliti akan mempertimbangkan konteks lokal dan spesifik dari PKB di Kota Malang serta bagaimana mereka mengadaptasi strategi politik mereka untuk mendukung keterlibatan perempuan di ranah politik.

Kajian **kelimabelas** Aspinall et al. (2021) menganalisis berbagai hambatan yang dihadapi perempuan dalam mendapatkan representasi politik di Indonesia serta cara-cara yang dilakukan oleh calon perempuan untuk mengatasi hambatan tersebut. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan mengumpulkan data dari tiga sumber utama: hasil penelitian dari tiga belas tim peneliti yang mempelajari calon perempuan yang mengikuti pemilu 2019, survei terhadap 127 calon perempuan, dan survei nasional yang mewakili pandangan masyarakat Indonesia.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sikap patriarkal yang meluas merupakan salah satu hambatan signifikan bagi representasi politik perempuan. Penelitian ini menemukan dua metode khas yang digunakan oleh calon perempuan untuk mengatasi hambatan tersebut: pertama, kelompok calon yang menargetkan

pemilih perempuan dan memanfaatkan jaringan sosial perempuan untuk mobilisasi; kedua, calon dinasti yang mengandalkan sumber daya politik dan finansial dari kerabat laki-laki. Jurnal ini juga mencatat bahwa meskipun ada tantangan, politik Islam tidak selalu menjadi penghalang bagi representasi perempuan; sebaliknya, beberapa calon dari partai Islam dapat memanfaatkan jaringan dan simbol Islam untuk mobilisasi pemilih.

Dibandingkan dengan kajian peneliti, terdapat beberapa perbedaan signifikan dibandingkan dengan jurnal tersebut. Pertama, fokus kajian peneliti lebih terarah pada strategi konkret yang diterapkan oleh PKB dalam mendukung kader perempuannya di tengah tantangan dari teori-teori Islam yang menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Sementara jurnal ini lebih menekankan pada pengalaman umum calon perempuan di Indonesia tanpa mengaitkannya secara langsung dengan konteks partai tertentu. Kedua, peneliti akan mengeksplorasi bagaimana PKB dapat menggunakan argumen-argumen dari perspektif feminis Islam untuk mendukung kader perempuannya dalam posisi kepemimpinan. Jurnal ini menunjukkan bahwa meskipun ada hambatan, beberapa calon perempuan berhasil memanfaatkan konteks sosial dan budaya untuk maju kajian peneliti akan menganalisis bagaimana PKB dapat beradaptasi dengan norma-norma tradisional sambil tetap mendukung keterlibatan perempuan.

Kajian **keenambelas** Weeks et al. (2023) menganalisis kondisi di mana partai populis kanan radikal (RRP) mulai memilih lebih banyak perempuan sebagai anggota parlemen. Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan mengembangkan dataset komprehensif yang mencakup 187 partai di 30 negara Eropa dari tahun 1985 hingga 2018.

Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami kapan dan mengapa partai RRP memilih lebih banyak perempuan sebagai wakil mereka. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan teori baru tentang *strategic descriptive representation*, yang menyatakan bahwa partai yang sedang berjuang secara elektoral dan memiliki kesenjangan gender dalam dukungan pemilih akan meningkatkan proporsi perempuan di parlemen untuk menarik pemilih perempuan yang sebelumnya tidak terjangkau. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partai RRP cenderung meningkatkan jumlah perempuan dalam delegasi parlementer

mereka ketika mereka mengalami penurunan suara dan kekurangan dukungan dari pemilih perempuan. Penelitian ini menemukan bahwa strategi ini tidak hanya unik bagi partai RRP, tetapi juga menunjukkan bahwa peningkatan representasi perempuan dapat digunakan sebagai alat untuk menarik pemilih baru tanpa harus mengubah posisi programatik partai yang sudah ada. Temuan ini menantang narasi bahwa partai RRP sepenuhnya didominasi oleh laki-laki dan menunjukkan bahwa perempuan dapat menjadi sumber daya penting bagi partai-partai tersebut.

Terdapat beberapa perbedaan mendasar yang perlu diperhatikan jurnal tersebut berfokus pada bagaimana partai populis kanan radikal (RRP) mulai memilih lebih banyak perempuan sebagai anggota parlemen sebagai respons terhadap penurunan dukungan pemilih dan kesenjangan gender dalam basis pemilih mereka, menggunakan pendekatan kuantitatif untuk menganalisis data dari 187 partai di 30 negara Eropa. Sementara itu, kajian peneliti lebih terarah pada strategi konkret yang diterapkan oleh PKB, sebuah partai berbasis Islam, dalam mencalonkan kader perempuannya di tengah tantangan dari teori-teori Islam yang menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Jurnal ini menekankan pada penggunaan representasi deskriptif sebagai alat strategis untuk menarik pemilih perempuan tanpa mengubah posisi programatik partai, sedangkan kajian peneliti akan mengeksplorasi bagaimana PKB dapat memanfaatkan argumen feminis Islam untuk mendukung keterlibatan perempuan dalam politik, serta bagaimana mereka beradaptasi dengan norma-norma tradisional yang ada. Dengan demikian, meskipun kedua penelitian ini membahas tema representasi politik perempuan, fokus dan konteksnya sangat berbeda, mencerminkan dinamika politik yang unik di Eropa dan Indonesia.

Kajian **ketujuhbelas** Aryanti et al. (2023) menganalisis strategi politik Partai Indonesia Raya (Gerindra) dalam memenuhi representasi perempuan di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Pontianak menjelang pemilihan umum 2024. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk mengeksplorasi kondisi objek penelitian secara mendalam. Peneliti berperan sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data, yang mencakup wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan

strategi yang diterapkan oleh Gerindra dalam meningkatkan kuota representasi perempuan di DPRD.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa peningkatan kuota representasi perempuan merupakan bagian dari implementasi kebijakan afirmatif yang bertujuan untuk mempercepat pencapaian kesetaraan gender. Penelitian ini menemukan bahwa kolaborasi antara partai politik, pemerintah, dan calon perempuan sangat diperlukan untuk mencapai tujuan ini. Meskipun ada kemajuan dalam representasi perempuan, tantangan masih ada, termasuk pandangan budaya yang patriarkal dan kurangnya dukungan dari partai politik untuk memberikan akses yang memadai bagi perempuan.

Dibandingkan dengan kajian peneliti, terdapat beberapa perbedaan mendasar yang perlu dicermati. Jurnal tersebut berfokus pada strategi yang diterapkan oleh Partai Indonesia Raya (Gerindra) untuk meningkatkan representasi perempuan di DPRD Kota Pontianak melalui kebijakan afirmatif dan kolaborasi dengan berbagai pihak, menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis kondisi politik lokal. Sementara itu, kajian peneliti lebih terarah pada bagaimana PKB, sebagai partai berbasis Islam, menghadapi tantangan dari teori-teori Islam yang menyatakan bahwa perempuan tidak boleh menjadi pemimpin. Jurnal ini menekankan pentingnya kolaborasi antara partai politik, pemerintah, dan calon perempuan untuk mencapai kuota representasi, sedangkan kajian peneliti akan menganalisis bagaimana PKB dapat memanfaatkan argumen-argumen dari perspektif feminis Islam untuk mendukung kader perempuannya dalam posisi kepemimpinan. Selain itu, fokus peneliti juga akan mempertimbangkan konteks lokal dan spesifik dari PKB di Indonesia serta bagaimana mereka merespons tantangan sosial dan politik yang ada.

Kajian **kedelapanbelas** Mampris et al. (2023), menganalisis strategi yang diterapkan oleh Dedi Hamzah dalam memenangkan pemilihan umum di daerah pemilihannya. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk menganalisis strategi politik yang digunakan oleh Dedi Hamzah dalam meraih suara di pemilihan umum, serta faktor-faktor yang mendukung keberhasilan strategi tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Dedi Hamzah menerapkan tiga strategi kemenangan utama: pertama, sosialisasi dan komunikasi politik melalui

media kampanye dan pertemuan langsung dengan masyarakat. Kedua, pendekatan basis massa yang berfokus pada penguatan ikatan emosional dengan kelompok-kelompok dukungan. Ketiga, penguatan komitmen antara pemilih dan calon. Penelitian ini menemukan bahwa faktor ketokohan Dedi Hamzah serta kedekatan emosional dengan pemilih sangat mempengaruhi keputusan politik mereka.

Dibandingkan dengan kajian tersebut, peneliti akan mengeksplorasi bagaimana PKB dapat menggunakan argumen-argumen dari perspektif feminis Islam untuk mendukung kader perempuannya dalam posisi kepemimpinan. Jurnal ini menunjukkan pentingnya sosialisasi dan komunikasi politik dalam membangun dukungan, sedangkan kajian peneliti akan menganalisis bagaimana PKB dapat beradaptasi dengan norma-norma tradisional sambil tetap mendukung keterlibatan perempuan.

Kajian **kesembilanbelas** Nikmah et al. (2021), menganalisis strategi yang digunakan oleh H. Nuruddin Amin dalam memenangkan pemilihan legislatif dengan memanfaatkan identitas Nahdlatul Ulama (NU). Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi kemenangan Gus Nung dengan mengonstruksi identitas NU dalam pemilihan legislatif di Jepara dan untuk menganalisis faktor-faktor pendukung yang berkontribusi terhadap keberhasilan strategi tersebut.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Gus Nung menerapkan strategi ofensif dan defensif dalam kampanyenya. Strategi ofensif mencakup pembentukan tim sukses, penyusunan program kampanye berbasis identitas NU, dan penguatan citra diri sebagai tokoh NU. Sementara itu, strategi defensif melibatkan silaturahmi melalui acara keagamaan dan kegiatan sosial untuk memperkuat hubungan dengan pemilih. Penelitian ini menemukan bahwa ketokohan Gus Nung sebagai figur NU sangat berpengaruh terhadap keputusan pemilih, serta adanya dukungan kuat dari jaringan NU yang ada di masyarakat.

Perbandingan kajian tersebut dengan kajian peneliti terletak pada focus penelitian. Kajian tersebut memanfaatkan citra keagamaannya sebagai pendekatan kepada masyarakat. Sedangkan kajian peneliti mengkaji tentang bagaimana kandidat perempuan dapat bersaing ditengah tantangan sosio kultural masyarakat Kota Malang.

Kajian **keduapuluh** Safitri et al., (2024) menganalisis strategi yang diterapkan oleh Partai Demokrat dalam menarik dukungan dari pemilih muda menjelang pemilihan umum 2024. Tujuan utama dari penelitian ini adalah untuk memahami strategi yang digunakan oleh Partai Demokrat dalam meningkatkan suara pemilih muda dan untuk mengevaluasi efektivitas strategi tersebut dalam konteks pemilu 2024. Penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan tentang bagaimana partai politik dapat beradaptasi dengan perubahan demografi pemilih dan tantangan politik yang ada.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Partai Demokrat menerapkan berbagai strategi, termasuk strategi ofensif dan defensif, serta marketing politik. Strategi ofensif difokuskan pada penyerangan terhadap pesaing dan penguatan citra partai di kalangan pemilih muda, sementara strategi defensif mencakup upaya untuk mempertahankan dukungan dari pemilih yang sudah ada. Dibandingkan dengan kajian peneliti, kajian tersebut menekankan pentingnya sosialisasi dan komunikasi politik dalam membangun dukungan dan citra politik.

2.2 Kerangka Teori

2.2.1 Strategi

Istilah strategi berasal dari kata *Strategia* dari Bahasa Yunani yang diartikan sebagai “*the art of general*” atau seni seorang panglima perang (Silitonga & Roring, 2023). Strategi dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia merupakan rencana yang cermat mengenai kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran khusus. Strategi politik dalam konteks pemilihan umum di Kota Malang dapat diartikan sebagai serangkaian rencana, taktik, dan aksi yang sistematis dan terarah yang digunakan oleh calon atau partai politik untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam pandangan Peter Schroder, strategi politik melibatkan penggunaan sumber daya yang signifikan dan memerlukan keputusan manajemen tingkat atas untuk mengatasi tantangan dan mencapai hasil yang diinginkan. Tujuan adalah elemen paling penting dalam strategi politik. Tujuan harus spesifik, terukur, dapat dicapai, relevan, dan berbatas waktu. Misalnya, dalam konteks pemilihan umum, tujuan mungkin adalah

memenangkan kursi legislatif atau meningkatkan keterwakilan perempuan di lembaga legislatif (No et al., 2020). Tujuan ini menjadi landasan bagi semua kegiatan strategis yang akan dilakukan.

Analisis lingkungan adalah langkah berikutnya yang sangat penting. Analisis ini melibatkan identifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang dapat mempengaruhi pencapaian tujuan. Ini termasuk analisis untuk memahami posisi organisasi dalam konteks eksternal dan internal. Misalnya, dalam konteks pemilihan umum di Kota Malang, analisis lingkungan yang mungkin melibatkan penilaian ketahanan dan ancaman partai yang dihadapi, serta penentuan posisi dan pemasaran atau *marketing* (Lestari et al., 2019). Dengan demikian, partai dapat memahami posisinya dan mengembangkan strategi yang tepat untuk menghadapi tantangan.

Dalam konteks strategi politik menurut Peter Schroder, komponen strategi mencakup beberapa elemen penting yang saling berinteraksi dalam membentuk dinamika sistem politik. Strategi politik tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk memenangkan pemilu, tetapi juga mencerminkan bagaimana aktor politik, baik individu maupun partai, memposisikan diri dalam tatanan sosial dan politik. Komponen utama dalam strategi politik menurut Schroder mencakup pendekatan defensif dan ofensif. Setiap komponen memiliki peran yang spesifik dan sering kali saling melengkapi untuk menciptakan strategi yang efektif dalam meraih kemenangan politik. Pertama, Strategi defensif bertujuan untuk mempertahankan basis dukungan yang sudah ada. Pendekatan ini sangat relevan dalam konteks di mana kandidat atau partai memiliki wilayah, kelompok, atau segmen pemilih yang menjadi basis tradisionalnya. Dalam strategi ini, fokus utama adalah memastikan bahwa pemilih loyal tetap setia dengan cara memperkuat hubungan emosional, menjaga kepercayaan, dan memberikan manfaat nyata. Selain itu, strategi defensif juga mencakup upaya melindungi kandidat dari serangan politik atau kritik yang berpotensi merusak citra mereka. Dalam praktiknya, hal ini dapat dilakukan melalui klarifikasi isu, pengelolaan krisis, atau peningkatan keterlibatan komunitas.

Selanjutnya, strategi ofensif berorientasi pada ekspansi dan perluasan pengaruh politik. Pendekatan ini digunakan untuk menarik pemilih baru atau merebut suara dari lawan politik. Dalam strategi ofensif, penting untuk mengidentifikasi kelemahan lawan dan mengembangkan narasi yang menarik bagi segmen pemilih tertentu yang belum tergarap. Kampanye yang agresif seperti propaganda politik atau pendekatan langsung kepada masyarakat melalui program-program inovatif, adalah contoh taktik yang sering digunakan dalam strategi ini. Strategi ofensif mengharuskan kandidat atau partai berani mengambil risiko untuk mengubah status quo demi mendapatkan keuntungan elektoral.

Kedua elemen strategi ini saling melengkapi dan harus diintegrasikan secara dinamis agar mampu menghadapi tantangan politik yang kompleks. Dalam pemilu legislatif, misalnya, kombinasi strategi defensif untuk menjaga basis suara, strategi ofensif untuk memperluas pengaruh untuk memaksimalkan eksposur kandidat, dapat menjadi kunci keberhasilan. Oleh karena itu, keberhasilan strategi politik sangat bergantung pada kemampuan aktor politik untuk membaca situasi, mengidentifikasi peluang, dan merancang pendekatan yang relevan dengan konteks sosial dan politik yang dihadapi. Dalam konteks pemilihan umum legislatif Kota Malang tahun 2024, pemahaman tentang komponen-komponen ini akan sangat membantu anggota legislatif perempuan dari PKB dalam merumuskan strategi politik yang efektif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat serta tantangan yang ada di lingkungan mereka.

2.2.2 Perwakilan Perempuan Dalam Politik

Perempuan dikatakan sebagai manusia yang hanya berperan sebagai pengganti dari laki-laki bahkan dalam dunia politik sekalipun. Perempuan dalam sistem pembagian kerja secara seksual cenderung selalu ditempatkan dalam wilayah domestik atau rumah tangga, dengan serangkaian kerja yang sifatnya reproduktif (S Zuhri, et al., 2022). Dalam hal ini, rintangan yang harus dilalui oleh politisi Perempuan harus lebih besar dibandingkan dengan

laki-laki. Perempuan dituntut untuk memiliki kemampuan dan skill yang sama dengan laki-laki.

Keterwakilan perempuan dalam politik di Indonesia diatur oleh berbagai kebijakan afirmatif. Salah satu contoh adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang menetapkan kuota minimal 30% untuk calon legislatif perempuan. Kebijakan ini bertujuan untuk mengatasi ketidaksetaraan gender yang telah lama ada dan memberikan ruang bagi perempuan untuk berpartisipasi secara aktif dalam politik. Meskipun demikian, tantangan tetap ada, seperti budaya patriarki yang masih kuat dan kurangnya dukungan bagi perempuan dalam posisi kepemimpinan.

Perwakilan perempuan dalam politik juga berfungsi sebagai simbol pergerakan menuju kesetaraan gender. Kehadiran perempuan dalam lembaga legislatif diharapkan dapat menginspirasi generasi mendatang untuk terlibat dalam politik dan memperjuangkan hak-hak mereka. Namun, meskipun ada kemajuan dalam hal jumlah perempuan di parlemen, tantangan struktural dan budaya masih perlu diatasi agar keterwakilan ini dapat berfungsi secara efektif (Martini et al., 2021).

Perwakilan perempuan dalam politik memiliki peranan yang sangat penting dan multifungsi dalam membentuk kebijakan serta mempengaruhi dinamika sosial di masyarakat. Salah satu fungsi utama dari perwakilan perempuan adalah untuk memastikan bahwa perspektif dan kebutuhan perempuan terwakili dalam pengambilan keputusan politik. Dalam banyak konteks, suara perempuan sering kali terpinggirkan, dan kehadiran mereka dalam lembaga legislatif menjadi kunci untuk mengatasi ketidaksetaraan gender yang telah berlangsung lama. Dengan adanya perempuan dalam posisi pengambilan keputusan, kebijakan yang dihasilkan dapat lebih inklusif dan responsif terhadap isu-isu yang dihadapi oleh perempuan dan keluarga, seperti kesehatan reproduksi, pendidikan, dan perlindungan sosial. Hal ini sangat penting karena kebijakan yang tidak mempertimbangkan perspektif perempuan cenderung tidak efektif dan tidak mencerminkan kebutuhan masyarakat secara keseluruhan.

Selain itu, perwakilan perempuan juga berfungsi sebagai advokat untuk isu-isu gender. Mereka memiliki kemampuan untuk mengangkat masalah-masalah yang sering kali diabaikan dalam diskusi politik, seperti kekerasan terhadap perempuan, kesenjangan upah antara laki-laki dan perempuan, serta akses terhadap layanan kesehatan dan pendidikan. Dengan menjadi suara bagi isu-isu ini, anggota legislatif perempuan dapat mendorong perubahan kebijakan yang lebih adil dan setara. Misalnya, mereka dapat memperjuangkan undang-undang yang melindungi hak-hak perempuan atau program-program yang mendukung pemberdayaan ekonomi perempuan. Dalam banyak kasus, keberadaan perempuan dalam politik juga dapat mendorong partisipasi masyarakat yang lebih luas, karena mereka sering kali dianggap lebih dekat dengan masalah-masalah sehari-hari yang dihadapi oleh warga.

Fungsi lain dari perwakilan perempuan dalam politik adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya keterwakilan gender. Kehadiran perempuan di lembaga legislatif dapat berfungsi sebagai simbol pergerakan menuju kesetaraan gender dan memberikan inspirasi bagi generasi mendatang untuk terlibat dalam politik. Ketika masyarakat melihat bahwa perempuan dapat mencapai posisi kepemimpinan, hal ini dapat memotivasi lebih banyak perempuan untuk berpartisipasi dalam proses politik, baik sebagai pemilih maupun calon legislatif. Selain itu, mereka juga dapat membantu mengubah pandangan masyarakat tentang peran perempuan dalam politik dan mempromosikan nilai-nilai kesetaraan gender.

Perwakilan perempuan juga memainkan peran penting dalam pengembangan kebijakan yang lebih responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Mereka sering kali membawa pengalaman hidup dan perspektif unik yang berbeda dari rekan-rekan laki-laki mereka. Dengan latar belakang yang beragam, anggota legislatif perempuan dapat memberikan wawasan yang lebih komprehensif mengenai isu-isu sosial dan ekonomi yang dihadapi oleh masyarakat. Misalnya, mereka mungkin lebih peka terhadap dampak kebijakan tertentu terhadap keluarga dan anak-anak, sehingga dapat

menghasilkan kebijakan yang lebih holistik dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan.

Dalam konteks pemilihan umum, keberadaan calon legislatif perempuan juga dapat meningkatkan kualitas demokrasi. Keterwakilan perempuan dalam politik tidak hanya berkaitan dengan jumlah kursi yang diduduki oleh perempuan, tetapi juga dengan kualitas debat publik dan pembuatan kebijakan. Ketika terdapat lebih banyak suara dari berbagai latar belakang, termasuk suara perempuan, maka proses pengambilan keputusan menjadi lebih kaya dan mencerminkan keragaman masyarakat. Ini menciptakan ruang bagi dialog yang lebih konstruktif dan kolaboratif antara berbagai kelompok dalam masyarakat.

Secara keseluruhan, fungsi perwakilan perempuan dalam politik sangat krusial untuk memastikan bahwa suara semua lapisan masyarakat didengar dan diperhitungkan dalam proses pengambilan keputusan. Dengan membawa perspektif unik mereka ke meja perundingan, anggota legislatif perempuan tidak hanya memperjuangkan hak-hak mereka sendiri tetapi juga membantu membangun masyarakat yang lebih adil dan setara bagi semua orang. Oleh karena itu, meningkatkan keterwakilan perempuan dalam politik harus menjadi prioritas bagi semua pihak yang peduli terhadap pembangunan sosial dan ekonomi yang inklusif serta berkelanjutan.

2.2.3 Pemilihan Umum Legislatif

Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) merupakan salah satu elemen fundamental dalam sistem demokrasi, yang memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memilih wakil-wakil mereka di lembaga legislatif. Lembaga ini berfungsi sebagai wadah representasi rakyat dalam pembuatan undang-undang, pengawasan kebijakan pemerintah, dan pengambilan keputusan penting yang memengaruhi kehidupan masyarakat. Proses ini mencerminkan kedaulatan rakyat dan menjadi landasan utama dalam membangun pemerintahan yang demokratis.

Di Indonesia, Pileg diadakan setiap lima tahun sekali dan menjadi bagian integral dari rangkaian pemilihan umum yang melibatkan pemilihan

anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) di tingkat provinsi dan kabupaten/kota. Sistem pemilu legislatif di Indonesia menggunakan dua mekanisme utama, yaitu pemilihan langsung dan sistem perwakilan proporsional. Pemilihan langsung memungkinkan masyarakat untuk memilih kandidat secara personal berdasarkan kepercayaan dan preferensi mereka. Sementara itu, pada sistem perwakilan proporsional, suara yang diberikan kepada partai politik menentukan jumlah kursi yang diperoleh partai tersebut di lembaga legislatif. Kombinasi kedua mekanisme ini mencerminkan fleksibilitas demokrasi Indonesia, yang mengutamakan keterwakilan individu sekaligus partai politik.

Pemilu legislatif memiliki tujuan utama untuk menciptakan lembaga legislatif yang mampu membawa aspirasi masyarakat ke tingkat pemerintahan. Wakil-wakil yang terpilih bertanggung jawab menyuarakan kepentingan rakyat dalam penyusunan kebijakan publik dan pengambilan keputusan legislatif. Selain itu, lembaga legislatif juga menjalankan fungsi pengawasan terhadap eksekutif, memastikan bahwa kebijakan pemerintah sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Dengan demikian, Pileg tidak hanya menjadi sarana partisipasi politik, tetapi juga mekanisme checks and balances yang penting dalam sistem demokrasi.

Sebagai wujud kedaulatan rakyat, Pileg memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam proses pengambilan keputusan politik. Setiap suara yang diberikan oleh pemilih menjadi bagian penting dalam menentukan arah kebijakan negara. Dengan memilih wakil-wakil mereka, masyarakat turut menentukan siapa yang akan membawa aspirasi mereka di tingkat legislatif. Hal ini juga menjadi simbol kepercayaan masyarakat kepada sistem demokrasi, di mana suara rakyat dianggap sebagai dasar utama dalam pembentukan pemerintahan yang sah dan responsif.

Namun, pelaksanaan Pileg di Indonesia tidak terlepas dari berbagai tantangan. Salah satu tantangan utama adalah rendahnya tingkat partisipasi pemilih di beberapa daerah, yang sering kali disebabkan oleh kurangnya

pendidikan politik atau rasa apatis terhadap sistem politik. Selain itu, praktik politik uang dan penyalahgunaan kekuasaan kerap mencederai integritas pemilu. Fenomena ini menjadi ancaman serius bagi pelaksanaan pemilu yang jujur, adil, dan transparan. Jika dibiarkan, masalah ini dapat merusak kepercayaan masyarakat terhadap demokrasi dan menghambat proses pembangunan politik yang sehat.

Pileg juga menghadirkan tantangan dalam memastikan keterwakilan yang inklusif. Masih terdapat kelompok-kelompok tertentu, seperti perempuan, penyandang disabilitas, dan masyarakat adat, yang menghadapi hambatan dalam proses politik. Oleh karena itu, upaya untuk meningkatkan representasi kelompok-kelompok ini di lembaga legislatif harus terus diperjuangkan. Langkah-langkah seperti kebijakan afirmasi atau pelatihan kepemimpinan politik bagi kelompok-kelompok tersebut dapat membantu menciptakan keterwakilan yang lebih merata.

Sebagai bagian integral dari demokrasi, Pileg tidak hanya menjadi mekanisme pemilihan wakil rakyat, tetapi juga tonggak penting dalam menjaga stabilitas politik dan pembangunan bangsa. Proses ini memberikan masyarakat kesempatan untuk menentukan arah kebijakan negara, memperkuat akuntabilitas pemerintah, dan menciptakan pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan rakyat.

Dengan pelaksanaan yang lebih baik dan partisipasi aktif dari seluruh elemen masyarakat, Pileg dapat terus menjadi instrumen utama dalam membangun demokrasi yang inklusif, berkeadilan, dan berkelanjutan di Indonesia. Dalam jangka panjang, keberhasilan Pileg akan berkontribusi pada terciptanya pemerintahan yang lebih transparan, akuntabel, dan mampu menghadirkan kebijakan yang benar-benar mencerminkan aspirasi rakyat.